

LAMPIRAN II :

RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM

RPJMD KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014-2019

**RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR SPM
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN 2014-2019**

DINAS KESEHATAN

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan kunjungan Ibu hamil	95 %	2015	67.6	72.2	78.6	84.0	89.5	95.0	Dinas Kesehatan
			2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	2015	57.2	61.0	64.8	68.6	72.4	80.0	
			3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90%	2015	80.0	81.7	83.4	85.0	86.7	90.0	
			4. Cakupan pelayanan nifas	90%	2015	68.2	71.8	75.5	79.1	82.7	90.0	
			5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80%	2010	28.7	37.3	45.8	54.4	62.9	80.0	
			6. Cakupan kunjungan bayi,	90%	2010	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	
			7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI	100%	2010	85.1	87.5	90.0	92.5	95.0	100	
			8. Cakupan pelayanan anak balita	90%	2010	41.9	49.9	58.0	66.0	74.0	90.0	
			9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100 %	2010	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
			10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	2010	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			11. Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100 %	2010	99.2	99.4	99.5	99.6	99.7	100.0	
			12. Cakupan peserta KB aktif	70%	2010	49.9	53.3	56.6	60.0	63.3	70.0	
			13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	100%	2010							
			A. AFP rate Per 100.000 penduduk < 15 Tahun	>=2	2.0	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	>=2	
			B. Penemuan Penderita Pneumonia Balita Penanganan	100	27.6	39.7	51.8	63.8	75.9	75.9	100	
			C. Penemuan pasien baru TB BTA Positif	100	53.1	60.9	68.7	76.5	84.4	92.2	100.0	
			D. Penderita DBD yang ditangani	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
			E. Penemuan Penderita diare	100.0	102.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
			14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	2015.	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
2	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Rujukan	1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	2015	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Dinas Kesehatan
			2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	100%	2015	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Kesehatan	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa /KLB	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	< 24 jam 100%	2015	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Dinas Kesehatan
4	Kesehatan	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	2015	54.8	54.9	63.2	67.4	71.6	80.0	Dinas Kesehatan

DINAS SOSIAL

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sosial	<i>Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial</i> a. pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala kabupaten/kota	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80 %	2008-2015	70	73	75	77	80	80	Dinas sosial
		b. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	60%	2008-2015	70	90	80	80	80	80	Dinas sosial
2	Sosial	<i>Penyediaan sarana dan prasarana sosial</i> c. penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten/kota	Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80%	2008-2015	70,5%	70,3%	71,6%	72,5%	75,4%	80%	Dinas sosial
		d. penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten/kota	Persentase (%) wahana kesejahteraan social berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	2008-2015	60%	70%	60%	70%	60%	60%	Dinas sosial

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Sosial	<i>Penanggulangan korban bencana</i> c. bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten/kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	2008-2015	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Dinas sosial
		d. evakuasi korban bencana skala kabupaten/kota	Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	2008-2015	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Dinas sosial

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lingkungan Hidup	Pelayanan informasi status mutu air	Prosentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	100%	2013	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BLHK
2	Lingkungan Hidup	Pelayanan informasi status mutu udara ambien	Prosentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya	100%	2013	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BLHK
3	Lingkungan Hidup	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	2013	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BLHK
4	Lingkungan Hidup	Pelayanan pencegahan pencemaran air	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	100%	2013	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BLHK
5	Lingkungan Hidup	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrative dan teknis pencegahan pencemaran udara	100%;	2013	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BLHK

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Lingkungan Hidup	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%;	2013	NA	NA	100%	100%	100%	100%	BLHK
7	Pemerintahan Dalam Negeri	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	25%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BLHK
			Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75%	2015	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BLHK

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pemerintahan Dalam Negeri	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	100%	2011	60,65	80	85	90	95	100	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
			2. Cakupan penerbitan akta kelahiran	100%	2011	76,95	80	85	90	95	100	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

BAKESBANGPOL DAN SATPOL PP

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pemerintahan Dalam Negeri	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	50%	2015	-	50%	50%	60%	70%	80%	Kesbangpol dan Pol PP
		Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	2. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota	70%	2010	-	70%	70%	80%	90%	100%	Kesbangpol dan Pol PP
2	Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kesbangpol dan Pol PP

DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Perumahan Rakyat	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	2009-2025	55,38%	61,15%	66,92%	72,69%	78,46%	84,23%	Dinas PU
			2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70 %	2009-2025	50,01%	56,68%	63,34%	70,01%	76,67%	83,34%	Dinas PU
2	Perumahan Rakyat	Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	3. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	100%	2009-2025	72,65%	75,54%	78,43%	81,33%	84,22%	87,11%	Dinas PU

BADAN KB DAN PP

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%	2014	50	75	85	90	95	90	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%	2014	15	20	25	50	60	75	

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pendidikan Dasar	Pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota	1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	89,90%	2014	89,98 %	90,40%	90,90%	91,40%	91,90%	92,40%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis	90,95%	2014	90,98 %	91,05%	92,05%	93,05%	94,05%	95,05%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	92,13%	2014	92,79	93,13%	94,13%	95,13%	96,13%	97,13%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	96,98%	2014	97,15 %	97,48 %	97,98 %	98,98%	98,48 %	98,98 %	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;	73,28%	2014	73,05 %	73,35%	73,85%	74,35%	74,85%	75,35%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1	94,83%	2014	95,02 %	95,33%	95,83%	96,33%	96,83%	97,33%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			7. Di setiap SD/MI tersedia 2	66,38%	2014	66,50 %	66,88%	67,38%	67,88%	68,38%	68,88%	
			8. Di setiap SMP/MTs tersedia	86,21%	2014	86,55 %	86,71%	87,21%	87,71%	88,21%	88,71%	
			9. Di setiap SMP/MTs tersedia	96,98%	2014	97,06 %	97,48%	97,98%	98,48%	98,98%	99,48%	
			10. Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	50,86%	2014	50,98 %	51,36%	51,86%	52,36%	52,86%	53,36%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			11. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	86,21%	2014	86,55 %	86,71%	87,21%	87,71%	88,21%	88,71%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			12. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	96%	2014	96,25 %	96,50%	97,00%	97,50%	98,00%	98,50%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan	90,05%	2014	90,20 %	90,55%	91,05%	91,55%	92,05%	92,55%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.	76,80%	2014	76,96 %	77,30%	77,80%	78,30%	78,80%	79,30%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			15. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk	83,00%	2014	83,29 %	83,50%	84,00%	84,50%	85,00%	85,50%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	80,15%	2014	80,29 %	80,65%	81,15%	81,65%	82,15%	82,65%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (<i>globe</i>), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	47,96%	2014	48,12 %	48,46%	48,96%	49,46%	49,96%	50,46%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	68,96%	2014	69,26 %	69,46%	69,96%	70,46%	70,96%	71,46%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	50,18%	2014	50,97 %	51,68%	52,18%	52..68%	53,18%	53,68%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :	61,47%	2014	61,59 %	61,97%	62,47%	62,97%	63,47%	63,97%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			a) Kelas I - II : 18 jam per minggu;	36,05%								Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			b) Kelas III : 24 jam per minggu;	80%								
			c) Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau	64,04%								
			d) Kelas VII - IX : 27 jam per minggu;	65,79%								
			7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;	75,50%	2014	75,74 %	76,00%	76,50%	77,00%	77,50%	78,00%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;	65,25%	2014	65,52 %	65,75%	66,25%	66,75%	67,25%	67,75%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;	92,31%	2014	92,40 %	92,81%	93,31%	93,81%	94,31%	94,81%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;	75%	2014	75,01 %	75,50%	76,00%	76,50%	77,00%	77,50%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;	64,70%	2014	65,06 %	65,20%	65,70%	66,20%	66,70%	67,20%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan	53,84%	2014	54,08 %	54,34%	54,84%	55,34%	55,84%	56,34%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).	78,65%	2014	78,92 %	79,15%	79,65%	80,15%	80,65%	81,15%	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pekerjaan Umum	a. Sumber Daya Air Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat	1. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	100%	2014	0%	0%	20%	35%	45%	55%	Dinas PU
			2. Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	70%	2014	47,26%	51,99%	57,91%	62,91%	69,20%	76,12%	Dinas PU
2	Pekerjaan Umum	b. Jalan 1. Jaringan a) Aksesibilitas	3. Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100%	2014	55,09%	60,59%	66,64%	76,63%	84,29%	88,50%	Dinas PU
		b) Mobilitas	4. Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	100%	2014	60,94%	63,98%	67,17%	70,52%	74,04%	81,44%	Dinas PU
		c) Keselamatan	5. Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.	60 %	2014	34,03%	40,83%	48,99%	58,70%	67,50%	77,62%	Dinas PU
		2. Ruas a) Kondisi jalan	6. Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60 %	2014	45,73%	52,58%	60,46%	69,52%	79,94%	83,93%	Dinas PU

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		b) Kecepatan	7. Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.	60 %	2014	21,02%	35,08%	42,09%	50,50%	60,60%	69,69%	Dinas PU
3	Pekerjaan Umum	c. Air Minum	8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok 60 liter/ orang/hari		2014	50%	55,30%	60,59%	65,89%	71,18%	76,48%	Dinas PU
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Clutser Pelayanan	8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok 60 liter/ orang/hari									

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Sangat buruk	8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok 60 liter/ orang/hari	40%	2014							Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum	
		Buruk	8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok 60 liter/ orang/hari	50%	2014								Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
		Sedang	8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok 60 liter/ orang/hari	70%	2014								Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Baik	8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok 60 liter/ orang/hari	80%	2014							Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
		Sangat Baik	8. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok 60 liter/ orang/hari	100%	2014							Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum
4	Pekerjaan Umum	d. Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan) 1. Air limbah permukiman	9. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	60 %	2014							Dinas PU
			10. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan / kota.	5%	2014							Dinas PU
		2. Pengelolaan sampah	11. Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	20%	2014							Dinas PU

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			12. Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan	70%	2014							Dinas PU
		3. Drainase	13. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 Cm. selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50%	2014	33,90%	37,29%	41,02%	45,12%	49,64%	54,60%	Dinas PU
5.	Pekerjaan Umum	e. Penanganan pemukiman kumuh perkotaan	14. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	10%	2014	7,40%	5,92%	4,44%	2,96%	1,48%	0%	Dinas PU
6.	Pekerjaan Umum	f. Penataan bangunan dan lingkungan	15. Bangunan (IMB) terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di Kabupaten/kota.	100%	2014	47,55%	52,31%	57,54%	63,29%	69,62%	76,58%	Dinas PU
		1. Izin mendirikan										
		2. Harga standar	16. Bangunan gedung Negara (HSBGN) tersedianya pedoman.	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PU
			Harga standar bangunan gedung negara di kabupaten/kota	Rp./m ²	2014	3.210.000	3.531.000	3.884.100	4.272.510	4.699.761	5.169.737	

DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		h. Penataan Ruang 1. Informasi Penataan Ruang	19. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.	100%	2014 (Kabupaten/kota dan kecamatan)	50%	55%	60%	65%	70%	85%	Dinas PU
				90%	2014 (kelurahan)	0%	0%	50%	60%	70%	80%	
		2. Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR	20. Terlaksananya penjangkauan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.	100%	2014	55%	60%	75%	80%	85%	90%	Dinas PU
		3. Izin Pemanfaatan Ruang	21. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya.	100%	2014	48,98%	55%	59,58%	64,57%	68,75%	73,33%	Dinas PU

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	22. Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja.	100%	2014 (Kabupaten/ kota dan kecamatan)	58,54%	64,39%	70,82%	77,90%	85,69%	94,25%	Dinas PU
		5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	23. Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	25%	2010-2014	10,92%	12,01%	13,21%	14,53%	15,98%	17,58%	Dinas PU

DINAS NAKERTRANS

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ketenagakerjaan	Pelatihan Kerja	1. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016	75%	75%	80%	85%	90%	100%	Dinas Nakertrans
			2. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016	60%	65%	70%	80%	90%	100%	
			3. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016	60%	65%	70%	80%	90%	100%	
2	Ketenagakerjaan	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016	70%	75%	80%	85%	90%	100%	Dinas Nakertrans
3	Ketenagakerjaan	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Dinas Nakertrans
4	Ketenagakerjaan	Pelayanan keseptaraan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	2016	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Dinas Nakertrans
5	Ketenagakerjaan	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1. Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	2016	45%	65%	75%	80%	90%	100%	Dinas Nakertrans
			2. Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	2016	50%	60%	70%	80%	90%	100%	

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Transmigasi	Meningkatkan Kawasan Transmigrasi	Prosentase jumlah pemukiman Transmigasi yang dibangun	50%	2016	50%	50%	80%	90%	95%	100%	Dinas Nakertrans
		Meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat transmigrasi	Prosentase jumlah warga transmigrasi	60%	2016	60%	75%	80%	85%	90%	100%	
		Meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat transmigrasi	Prosentase jumlah warga transmigrasi regional	60%	2016	60%	75%	80%	85%	90%	100%	

BAPERSIKOM

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Komunikasi dan Informasi	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	1. Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui:									Bapersikom
			a) media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12 kali per tahun	2014	-	-	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	
			b) media baru seperti <i>website</i> (media <i>online</i>);	Setiap hari	2014	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	
			c) media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12 kali per tahun	2014	-	-	24 kali per tahun	24 kali per tahun	24 kali per tahun	24 kali per tahun	
			d) media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan lokakarya; dan/atau	12 kali per tahun	2014	-	-	3 kali per tahun	5 kali per tahun	8 kali per tahun	12 kali per tahun	
			e) media luar ruang seperti media buletin, <i>leaflet</i> , <i>booklet</i> , brosur, spanduk, dan baliho	12 kali per tahun	2014	12 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun	12 kali per tahun	
2	Komunikasi dan Informasi	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	2. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	2014	-	-	25%	50%	75%	100%	Bapersikom

BADAN KETAHANAN PANGAN

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ketahanan Pangan	a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan energi dan protein perkapita	90%	2015	90%	90%	90%	91,50%	93%	94%	Badan Ketahanan Pangan
			2. Penguatan cadangan pangan	60%	2015	60%	60,10%	60%	62%	63%	64%	
2	Ketahanan Pangan	b. Distribusi dan Akses Pangan	1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90%	2015	94%	90,5%	90%	92%	93%	94%	Badan Ketahanan Pangan
			2. Stabilitas harga dan pasokan pangan	90%	2015	89%	89,95%	90%	91,5%	93%	94,5%	
3	Ketahanan Pangan	c. Penganeka-ragaman dan Keamanan Pangan	1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%	2015	62,5 %	77%	90%	91%	93%	94%	Badan Ketahanan Pangan
			2. Pengawasan dan pembinaan kewanamanan pangan	80%	2015	75%	78%	80%	81%	83%	84%	
4	Ketahanan Pangan	d. Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan	60%	2015	66,67 %	68%	60%	62,50%	65%	70%	Badan Ketahanan Pangan

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kesenian	Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	a. Cakupan Kajian seni Kegiatan yang bersifat kajian adalah: 1. seminar 2. srasehan 3. diskusi 4. bengkel seni (workshop) 5. penyerapan narasumber 6. studi kepustakaan 7. penggalian 8. eksperimentasi 9. rekonstruksi 10. revitalisasi 11. konservasi 12. strudi banding 13. inventarisasi 14. dokumentasi 15. pengemasan bahan kajian	100	2014	-	27%	67%	107%	147%	160%	Dinas Pariwisata
				Jumlah			2	5	8	11	12	

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			b. Cakupan Fasilitas seni Jenis-jenis fasilitas dalam perlindungan, pengembangan, dan pemnafaatan bidang kesenian adalah: 1. penyuluhan substansial maupun teknikal 2. pemberian bantuan 3. bimbingan organisasi 4. kaderisasi 5. promosi 6. penerbitan dan pendokumentasian 7. kritik seni kabupaten/kota minimal melaksanakan 30% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan fasilitas seni	100	2014	-	95%	143%	190%	238%	286%	Dinas Pariwisata
			Jumlah			-	2	3	4	5	6	
			c. Cakupan gelar seni wujud gelar seni antara lain: 1. pagelaran 2. pameran 3. festival 4. lomba kabupaten/kota minimal melaksanakan 75% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan gelar seni.	100	2014							Dinas Pariwisata
			Jumlah Gelar Seni			-	2	3	4	4	4	

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			d. Misi kesenian pemerintah kabupaten/kota wajib mengadakan misi kesenian antar-daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi dan promosi kesenian daerahnya keluar daerah. kabupaten/kota melaksanakan 100% cakupan misi kesenian.	100	2014	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Pariwisata
2	Kesenian	Sarana dan prasarana	a. Cakupan sumber daya manusia kesenian Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian	100	2014	150	150	200	250	250	250	Dinas Pariwisata

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			sebagai berikut: 1. sarjana seni 2. pakar seni 3. pamong budaya 4. seniman/budayawan 5. kritikus 6. insane media massa 7. pengusaha 8. penyanggah dana kabupaten/kota menyediakan minimal 25% dari cakupan Sumber Daya Manusia	Jumlah SDM		3	3	4	5	5	5	

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			b. cakupan tempat 100% Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban menyediakan minimal: 1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan alat untuk pameran 2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya. Kabupaten/kota menyediakan minimal satu tempat yang mudah dicapai oleh masyarakat, dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas yang memungkinkan dan satu buah memasarkan karya seni.	100	2014	200	200	200	200	200	200	Dinas Pariwisata
			Jml Tempat			2	2	2	2	2	2	

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			c. Cakupan organisasi Pemerintah kabupaten/kota membentuk: 1. organisasi struktural yang menangani kesenian 2. lembaga/dewan kesenian 3. khusus pemerintah provinsi membentuk Taman Budaya sebagai UPT yang menangani kesenian. Kabupaten/kota minimal cakupan organisasi.	100	2014	98	98	196	196	196	196	Dinas Pariwisata
			Jml Organisasi			1	1	2	2	2	2	

DINAS PERHUBUNGAN

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Perhubungan	1. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten kota.	75%	2014	199	210	250	300	350	401	Dinas Perhubungan
			2. Tersedianya angkutan umum melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota	60%	2014	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
		2. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	3. Tersedianya Halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	2014	9	0	10	11	12	13	Dinas Perhubungan
			4. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40%	2014	4	0	5	6	0	7	Dinas Perhubungan

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3. Fasilitas perlengkapan jalan	5. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota.	60%	2014	25%	30%	40%	50%	60%	70%	Dinas Perhubungan
		4. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor	6. Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	2014	50%	60%	70%	80%	90%	100%	Dinas Perhubungan
		5. Sumber Daya Manusia (SDM)	7. Tersedianya sumber daya Manusia SDM dibidang terminal pada kabupaten/kota yang telah memiliki terminal	50%	2014	0	2	5	10	15	20	Dinas Perhubungan
			8. Tersedianya Sumber Daya Manusia SDM dibidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	2014	3	3	10	15	20	25	Dinas Perhubungan

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			9. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang MRLL, Evaluasi andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten/kota.	40%	2014	0	2	4	6	8	10	Dinas Perhubungan
			10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelayakan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.	100%	2014	1	1	3	4	5	6	Dinas Perhubungan
		6. Keselamatan	11. Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota.	100%	2014	50%	50%	60%	70%	80%	100%	Dinas Perhubungan
2	Angkutan Sungai dan danau	1. Jaringan pelayanan angkutan sungai dan danau	12. Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringantrayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayani	75%	2014	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			13. Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten/kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayani.	40%	2014	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
		2. Jaringan Prasarana Angkutan sungai dan danau	14. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah dilayani angkutan sungai dan danau.	60%	2014	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
		3. Keselamatan	15. Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu kabupaten/kota.	100%	2014	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4. Sumber daya Manusia (SDM)	16. Tersedianya Sumber Daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	50%	2014	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
3	Angkutan Penyeberangan	1. Jaringan pelayanan angkutan penyeberangan.	17. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.	60%	2014	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Dinas Perhubungan
			18. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.	100%	2014	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2. Jaringan prasarana angkutan penyeberangan.	19.Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	60%	2014	2	2	2	2	4	4	Dinas Perhubungan
		3. Keselamatan	20.Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran dibawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.	100%	2014	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
		4. Keselamatan	21. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran dibawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.	50%	2014	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Angktan Laut	1. Jaringan pelayanan angkutan laut	22. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	90%	2014	60%	60%	65%	69%	70%	75%	Dinas Perhubungan
			23. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100%	2014	0	0	0	0	0	0	
		2. Jaringan prasarana angkutan laut	24. Tersedianya Drmaga pada setiap ibukota/kecamatan dalam kabupaten/kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	60%	2014	0	0	0	10	20	30	Dinas Perhubungan

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3. Keselamatan.	25. Terpenuhi standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi lintas dalam kabupaten/kota.	100%	2014	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
		4. Sumber Daya Manusia (SDM)	26. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran dibawah 7 GT.	100%	2014	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan

KPPT DAN PM

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Bidang Perizinan dan PM	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	1 (satu) sektor/ bidang usaha/ tahun	2014	-	-	3	3	3	4	KPPT dan PM
2		Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan:									KPPT dan PM
			Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asling.	1 (satu) kali/ tahun	2014	-	2	1	2	3	3	
			Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali/ tahun	2014	-	-	2	2	2	3	
3		Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten.	1 (satu) kali/ tahun	2014	1	4	4	4	4	4	KPPT dan PM

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4		Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:	100%	2018	75%	80%	85%	90%	95%	100%	KPPT dan PM
			Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.	100%	2014	65%	75%	80%	85%	90%	100%	KPPT dan PM
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.	1 (satu) kali/ tahun	2014	-	1	1	2	2	2	KPPT dan PM

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)	KONDISI AWAL (2013)	TARGET					SATUAN KERJA / LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	NILAI			2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pengendalian Data dan Sistik Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).	1 Sistem	2014	1	1	1	1	1	1	KPPT dan PM
		Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/ tahun	2014	1	2	2	4	4	4	KPPT dan PM